PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 30 April 2015 Halaman: 1

Keraton Jangan Dijual Murah

Penataan Njeron Beteng, Akademisi Prioritaskan Daerah Cagar Budaya

JOGJA - Pemkot Jogja tak mau tergesa-gesa, apalagi gegabah dalam mengambil keputusan tentang larangan bus delapan *seat* ke atas masuk kawasan Njeron Beteng Keraton. Pemkot masih akan terus menjaring pendapat dari semua pihak, hingga deadline evaluasi uji coba larangan bus tersebut tiba.

Hingga kemarin, evaluasi juga masih terus berjalan. Kali ini, pemkot meminta saran dan pendapat dari kalangan akademisi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) dan Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM ■

▸ Baca *Keraton...* Hal 11

TAMANSARI: Wisatawan berkunjung ke salah satu objek wisata Njeron Beteng di Plaza Ngasem dan Pulo Cemeti, Jogja, kemarin (29/4).

GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Keraton Juga Akan Dimintai Pendapatnya

■ **KERATON...**

Sambungan dari hal 1

Ketua Dewan Peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Prof Muhammad Baiquni mengaku, pihaknya turut dilibatkan dalam mengkaji penataan di *njeron beteng*. Sesuai dengan kajian yang mereka lakukan, konsep awal adalah menjadikan kawasan Keraton ini sebagai wisata cagar budaya.

"Jadi, Keraton jangan dijual murah. Tapi, pengunjungnya terbatas karena daerah cagar budaya," tutur Baiquni, kemarin (29/4) usai rapat dengan tim kajian evaluasi pemkot.

Ia menjelaskan, penataan *njeron beteng* memang harus mempertimbangkan semua aspek. Mikro dan makro wajib menjadi fokus perhatian kajian. "Yang paling penting dengan mengedepankan dialektika untuk menemukan formula yang paling tepat," tandas Ketua Program S2/S3 Pariwisata UGM ini.

Terkait keluhan kalangan pelaku pariwisata terhadap larangan tersebut, Baiquni mengatakan, dengan melihat jalan-jalan di Keraton memang terbatas. Jika dilewati bus-bus besar, bisa menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan wisatawan, maupun warga yang akan berkunjung di Keraton. "Bisa dengan Elf atau transportasi tradisional," ujarnya.

Ia menegaskan, sebagai daerah wisata, selama ini, Keraton menjadi daya tarik bagi wisatawan karena cagar budayanya. Itu yang sebenarnya harus dikedepankan dalam kajian tersebut. "Parkirnya memang harus terbatas," usulnya.

Ia mencatat, sejarah Keraton sebenarnya tidak terbuka untuk umum. Dahulu, wisatawan yang bisa mengunjungi tempat tinggal Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono itu memang terbatas. Tak seperti saat ini yang terbuka bagi siapa saja dengan harga murah Rp 2.500/kepala.

Asisten Sekretaris Kota (Assekot) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadjaya mengaku, pihaknya tak akan tergesa-gesa untuk memutuskan kebijakan penataan di *njeron beteng* tersebut. Pemkot akan melibatkan semua pihak dengan memanggil mereka mengkaji bersama.

"Ini baru dari akademisi. Besok, dengan pelaku pariwisata," jelas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja ini.

Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan, Keraton selaku pemilik akan mereka undang untuk kajian ini. "Sebelum deadline, kami akan maksimalkan untuk banyak berdialog," jelas pejabat yang berkacamata ini. (**eri/jko/gp**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaa 3. Dinas Ketertiban 4. Badan Perencanaan Pembangunan 5. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005